

KOORDINASI BPBD DAN DINAS PUPR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Edho Yayang Pratama
NPP. 30.0415
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: pratamay0405@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si

ABSTRACT

Flood is a disaster that often occurs in Bengkulu City. This flood incident greatly stimulated activities in Bengkulu City, economic activities, government, and all aspects of people's lives would be hampered if a flood disaster was occurring. BPBD (Disaster Management Agency) is a regional government organization that has the task of implementing disaster management affairs and has a role in dealing with floods, but this cannot be done alone. The role of other local government organizations such as the PUPR (Public Development and Spatial Planning) Service in flood disaster management is also important, as is its leadership, namely technically maintaining and improving the infrastructure and facilities supporting BPBD activities in disaster management in Bengkulu City. This study aims to analyze the coordination of work between BPBD and the Public Works and Housing Agency in flood disaster management in Bengkulu City, Bengkulu Province. The method used in this research is qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Respondents in this study were BPBD officers and the PUPR Service involved in flood disaster management in Bengkulu City. The research was carried out from January 6 to 21 2023 at the Bengkulu City BPBD and the Bengkulu City PUPR Service. The results of the study show that the coordination between the BPBD and the PUPR Service is still not optimal in flood disaster management in Bengkulu City. There are several factors that affect coordination between the two agencies, such as a lack of effective communication and a lack of understanding of the roles of each agency. To improve coordination between the BPBD and the PUPR Office in flood disaster management in Bengkulu City, this study recommends increasing communication between the two agencies, a better understanding of the roles of each agency, and more structured and integrated planning. It is hoped that the results of this research can contribute to stakeholders in improving coordination between the BPBD and the PUPR Service in flood disaster management in Bengkulu City.

Keywords: Coordination, BPBD, PUPR Service, Flood Disaster, Bengkulu City

ABSTRAK

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi Kota Bengkulu. Peristiwa Banjir ini sangat mengganggu jalannya aktivitas di Kota Bengkulu, kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan segala aspek kehidupan masyarakat akan terhambat bila bencana Banjir sedang Terjadi. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana) adalah organisasi pemerintahan daerah yang memiliki tugas dalam

penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana memiliki peran dalam menghadapi banjir, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan sendirian. Peran organisasi pemerintahan daerah lainnya seperti Dinas PUPR (Pembangunan Umum dan Penataan Ruang) dalam penanggulangan bencana banjir juga penting, sebagaimana tugasnya yaitu secara teknis memelihara dan meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kegiatan BPBD dalam penanggulangan Bencana di Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi kerja antara BPBD dan Dinas PUPR dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah petugas BPBD dan Dinas PUPR yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 06 s/d 21 Januari tahun 2023 di BPBD Kota Bengkulu dan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR masih kurang optimal dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi antara kedua instansi, seperti kurangnya komunikasi yang efektif dan kurangnya pemahaman terhadap peran masing-masing instansi. Untuk meningkatkan koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan komunikasi antara kedua instansi, pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing instansi, dan perencanaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Koordinasi, BPBD, Dinas PUPR, Bencana banjir, Kota Bengkulu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai "suatu kejadian atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dan yang mengakibatkan korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis".

Kota Bengkulu adalah salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang sering kali di rundung bencana banjir. Hal ini bisa disebabkan karena Kota Bengkulu dapat ditemukan pada $30^{\circ}45'$ - $30^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}14'$ - $102^{\circ}22'$ Bujur Timur di pantai barat Pulau Sumatera, yang menghadap ke Samudera Indonesia. Tempat ini dapat ditemukan di sisi barat Pulau Sumatera, menghadap ke Samudra Hindia. Lingkungan pesisir Kota Bengkulu, mengingat posisinya, tunduk pada rezim energi gelombang yang kuat yang dipengaruhi oleh gelombang dan diprediksi akan menyebabkan erosi alami pantai. Sedimen di pantai dapat disebabkan oleh erosi atau abrasi pantai alami, dan akan diperparah dengan pasokan sedimen dari daerah aliran sungai besar di wilayah Kota Bengkulu. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota di masa depan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin sekaligus meminimalkan efek atau pengaruh buruk, penting untuk mengingat kondisi ini sebagai kemungkinan dan masalah yang harus diantisipasi.

Koordinasi pada hakikatnya merupakan bagian penting di antara penyelenggara pemerintahan dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pemerintah dilakukan antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dipandang oleh Harold Koontz bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan, tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya: 1) adanya rencana kerja, 2)

adanya pertemuan-pertemuan, 3) adanya komunikasi, 4) adanya pembagian tugas kerja. Berangkat dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana koordinasi BPBD dan Dinas PUPR dalam upaya penanggulangan bencana banjir Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan apa saja hambatan koordinasi BPBD dan Dinas PUPR dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul “Koordinasi BPBD Dan Dinas PUPR Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan informasi yang dilakukan penulis ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dan Dinas PUPR Kota Bengkulu dalam proses koordinasi penanggulangan bencana adalah hambatan dalam proses koordinasi anatar BPBD Kota Bengkulu dan Dinas PUPR Kota Bengkulu ialah sedikitnya dana anggran yang di berikan ke PUPR untuk proses mitigasi dan Kurangnya jumlah personil sehingga peninjauan lapangan dan penyampaian informasi dari BPBD kepada Dinas PUPR tidak maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Penelitian Endah Mustika Ramdani berjudul Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung (Endah Mustika Ramdani (2015), menemukan bahwa posisi koordinator telah dikelola dengan buruk. Paradigma manajemen bencana saat ini masih belum dipahami dengan baik. Lembaga-lembaga terkait koordinasi belum menyesuaikan dengan posisi baru BPBD sebagai koordinator, melainkan fokus pada aturan dan kebijakan internal mereka sendiri. Duplikasi upaya menunjukkan bahwa potensi spesialisasi pekerjaan belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan pengkajian kelembagaan yang komprehensif dalam disiplin ilmu terkait kebencanaan, bersama dengan peningkatan pengetahuan, pertumbuhan, dan sosialisasi. Penelitian Ivan Taslim, Muh. Firyal Akbar menemukan bahwa perlunya peningkatan keterlibatan sektor dalam fase pra dan pascabencana. Oleh karena itu, memprioritaskan koordinasi publik dalam pelaksanaan pembangunan sebelum bencana terjadi merupakan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko yang harus diprioritaskan agar tidak membahayakan keberlangsungan pembangunan (Ivan Taslim, Muh. Firyal Akbar, 2019). Penelitian Dera Izhar Hasanah, Rendy Adiwilaga, Hena Nurjanah menemukan bahwa koordinasi belum sepenuhnya berhasil karena ketidakadilan saat ini dalam pengendalian banjir. Duplikasi pekerjaan yang berkelanjutan, kurangnya kesadaran dan pembinaan di seluruh masyarakat, dan kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi adalah semua indikator bahwa definisi kerja program belum dioptimalkan (Hasanah, Dera Izhar, dkk (2021)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang koordinasi BPBD dan Dinas PUPR dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu perlu adanya tindakan koordinasi, metodenya yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif memuat informasi dalam bentuk deskriptif, yaitu fakta-fakta yang hasilnya berupa kalimat-kalimat dari objek yang diteliti. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Harold Koontz (Herman, 2011) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya adanya rencana kerja, adanya

pertemuan-pertemuan, adanya komunikasi, adanya pembagian tugas kerja yang berbeda dengan penelitian Endah Mustika Ramdani, Ivan Taslim dkk, Hasanah dkk.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya koordinasi BPBD dan Dinas PUPR dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan untuk mengetahui hambatan koordinasi BPBD dan Dinas PUPR dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif memuat informasi dalam bentuk deskriptif, yaitu fakta-fakta yang hasilnya berupa kalimat-kalimat dari objek yang diteliti. Metode ini dapat mengungkap makna realitas di balik pengamatan penulis. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penulis dan informan. Metode deskriptif bersifat terbuka dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Sumber Daya Air BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas PUPR, Staf Fungsional BPBD, Ketua RT 7 Kelurahan Tanjung Agung. Adapun analisisnya menggunakan teori dari Harold Koontz (Herman, 2011) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya adanya rencana kerja, adanya pertemuan-pertemuan, adanya komunikasi, adanya pembagian tugas kerja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis koordinasi BPBD dan Dinas PUPR dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu menggunakan pendapat dari Harold Koontz (Herman, 2011) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya adanya rencana kerja, adanya pertemuan-pertemuan, adanya komunikasi, adanya pembagian tugas kerja . Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Adanya Rencana Kerja

Di dalam pelaksanaan koordinasi terdapat rencana kerja, yang mana dengan adanya rencana kerja maka dapat dipahami mengenai maksud. dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan. Oleh karena itu, indikator, yaitu maksud dan sasaran, sasaran, dengan maksud untuk lebih mencirikan koordinasi komprehensif yang telah dilaksanakan antara BPBD dan Kantor PUPR dalam hal bantuan banjir dapat ditemukan dalam konteks rencana kerja.

3.1.1 Maksud dan Tujuan

Hasil dari wawancara bahwa tujuan utama koordinasi pelaksanaan mitigasi bencana banjir adalah agar masing-masing instansi tersebut, sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi utamanya, melakukan upaya mitigasi preventif sebelum banjir terjadi untuk mengurangi kemungkinan dan tingkat keparahan bencana berikutnya. Kantor PUPR adalah otoritas yang tepat yang bertanggung jawab atas langkah-langkah pencegahan bencana teknis seperti program kerja untuk menormalkan saluran yang berkontribusi terhadap banjir. Sementara itu, BPBD untuk mitigasi berperan sebagai

masyarakat dalam menurunkan kemungkinan dan kerusakan akibat bencana di masa depan di masyarakat dengan mengkoordinasikan upaya prabencana dari banyak instansi untuk bekerja sama.

3.1.2 Sasaran

Hasil dari wawancara dapat kita simpulkan bahwa BPBD dan Dinas PUPR tidak memiliki strategi bersama untuk melaksanakan kerja sama satu sama lain. Namun, masing-masing instansi telah menetapkan, atau memiliki rencana kerja atau program kerja yang sejalan dengan tanggung jawab dan wewenang utamanya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kedua instansi dapat memenuhi peran utamanya dan menjalankan kewenangannya masing-masing dalam operasi mitigasi yang berkaitan dengan penanganan teknis dan fisik sebagaimana dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Karena Dinas PUPR, melalui bidang pemeliharaan dan operasi irigasi, memiliki program kerja penanggulangan banjir seperti pengerukan saluran dangkal dan berpotensi banjir, pemeliharaan bantaran sungai, dan BPBD, di bawah kewenangan Kantor PUPR, memiliki program mitigasi non-teknis seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan bencana, kedua instansi berkoordinasi dalam upaya ini. Sehingga dalam pengamatan peneliti, terkait aspek rencana kerja dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR telah berjalan sesuai dengan teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013) dimana BPBD dan Dinas PUPR sudah Memiliki Rencana Kerja masing-masing sehingga pencapaian suatu tujuan yang dikoordinasikan juga maksimal.

3.2. Pertemuan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pertemuan antara BPBD dengan Dinas PUPR akan dilakukan saat musim hujan semakin dekat dan data meteorologi diperoleh dari BMKG. Dalam pertemuan tersebut, BPBD akan mengingatkan Dinas PUPR bahwa langkah-langkah perlindungan banjir, seperti pemeliharaan saluran drainase, harus dilaksanakan tanpa penundaan. Ini hanya delegasi BPBD yang mengirimkan informasi ke PUPR sebelum kemungkinan bencana banjir. Sehingga Peneliti mengatakan di dalam aspek tahap pertemuan- menurut teori (Harold Koontz dalam Herman, 2013) sudah terlaksanakan, BPBD mengirim orang ke PUPR untuk memberitahu informasi akan musim hujan dan kemungkinan ancaman banjir yang akan terjadi

3.3. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang paling berperan dalam koordinasi kerja. Komunikasi yang baik antara organisasi pemerintahan daerah akan memaksimalkan hasil dan tujuan yang akan dicapai. Komunikasi adalah transmisi informasi kepada orang lain berharap bahwa penerima informasi akan mengerti dan mengubah perilaku mereka atau mengimplementasikan informasi yang dikirim. Peneliti Memandang bahwa Pentingnya Koordinasi BPBD dan Dinas PUPR akan menjadi point terpenting. Penyampaian informasi antara kedua instansi yang baik akan menciptakan kerjasama yang baik, sehingga pelaksanaan dalam tugas mitigasi bencana banjir bisa di uayakan maksimal. Karena Komunikasi digunakan sebagai tolak ukur dalam meninjau keberhasilan maka komunikasi kerja anatar BPBD dan PUPR meliputi berapa aspek yaitu komunikasi dalam penanggulangan banjir, komunikasi penentu koordinator antara BPB dan PUPR, dan komunikasi kepada kelompok sasaran penanggulangan banjir.

3.3.1 Komunikasi Dalam Penanggulangan Banjir

Hasil dari wawancara bahwa pihak BPBD dalam berkomunikasi kepada Dinas PUPR menyampaikan informasi-informasi yang berisikan informasi yang akan di tindak lanjuti oleh PUPR dalam pemberhantuan mitigasi bencana banjir terutama di dalam koordiansi pembangunan sarana mitigasi. Dalam hal ini peneliti menilai komuikasi belum maksimal BPBDS dan Dinas PUPR

belum maksimal, bila informasi yang diberikan baik tentulah peristiwa bencana banjir akan bisa di kurangi di kota Bengkulu.

3.3.2 Komunikasi Penentu Koordinator BPBD dan Dinas PUPR

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak ada komunikasi penentu kordinator dalam program kerja semua bekerja pada tugasnya masing-masing teapi BPBD sering berkomunikasi denghan PUPR denga mengingtakan potensi banjir di musu hujan agar PUPR melakukan pencegahan dengan perbaikan dnrnase untuk mengurangi potensi bencana banjir.

Menurut peneliti, BPBD sudah baik berperan sebagai Leading Sektor penanganan bencana di peristiwa tanggap darurat bencana Banjir di kota bengkulu. BPBD menjadi pengambil komando koordinator di setiap bentuk kegiatan tanggap darurat, menjadi korditanor evakuasi bersama SAR, TNI, POLRI, menjdi Koordiator perawatan korban bersama Dinkes dan PMI, serta pelatyanan dapur umum bersama DInsos men unjukkan Bahwa BPBD memiliki komunikasi yang baik dalam penyelenggraan kebencanaan di kota bengkuliu terutama ditahap tanggap darurat Bencana

3.3.3 Komunikasi Kepada Kelompok Sasaran Penanggulangan Banjir

Menurut pengamatan Peneliti terkait komunikasi antara BPBD dan Dinas PUPR dalam berkoordinasi penanggulangan bencana banjir tidak berjalan secara maksimal sesuai teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013), Disini BPBD memang membrikan informasi kepada Dinas PUPR tetapi dalam proses pelaksanaanya tidak maksimal karena banjir masih sering terjadi di kota bengkulu membuktikan tidak maksimalnya perbaikan drainase oleh Dinas PUPR.

3.4 Pembagian Tugas

Saling tumpang tindih pekerjaan antar organisai pemerintah dalam melakuakn program kerja mengakibatkan ketidakpahaman pelaksanaan program kerja sehingga pencapai hasil kerja belum bisa maksimal sesuai program kerja yang di usung oleh Pemda. Ego sentral masing-masing instansi juga mempengaruhi proses pembagian kerja, program kerja juga masih belum bisa berjalan maksimal di akibatkan oleh keterbatasan angrgan, keterbatsan personil dan kurangnya sumber daya (skill personil dan saran prasarana). Sehingga untuk mengukur dan mengetahui proses koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dalam mitigasi bencana banjir maka peneliti akan menguraikan tugas masing – masing intasi dalam penanggulangan bencana banjir.

3.4.1 Tugas BPBD dalam Penanggulangan Banjir

Dalam pengamatan peneliti terhadap tuga BPBD bisa di Simpulkan bahwa MITigasi yang di lakukan BPBD banyaklah kegiatan mitigasi non- struktural yang berfokus kepada pembangunan informasi kepada masyarakat tentang bencana melalui sosialisai dan penyuluhan, rehabilitasi korban dan memberikan gambaran kondisi kebencanaan di Kota Bengkulu untuk di tindak lanjuti oleh Pemda Kota Bengkulu menjadi kegiatan mitigasi Struktural melalui Dinas PUPR kota Bengkulu.

3.4.2 Tugas PUPR dalam Penanggulangan Banjir

Dalam pengamatan peneliti bahwa dari aspek pembagian tugas tidak ada pembagian tugas yang terprogramkan anatar BPBD dan dinas PUPR. Setiap istansi menjalankan tupoksi dan program kerja masing-masing dan ini tidak sesuai dengan teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam

Herman, 2011), Di mana BPBD berfokus menjalankan tugasnya sebagai pelaksana penanggulangan bencana dan pihak PUPR hanya membantu dalam perbaikan drainase

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting yang di temukan oleh penulis ialah bahwa BPBD dan Dinas PUPR mempunyai tugas masing-masing dalam menyikapi kebencanaan. Koordinasi pada tahapan tanggap darurat bencana di lakukan bersama dan di koordinasikan oleh BPBD, namun setelah itu semuanya kembali ketugas masing-masing.

Kemudian, penelitian yang di lakukan oleh Endah Mustika Ramdani (2015) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Volume XII Nomor 3 “Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung”. Menunjukkan bahwasannya manajemen koordinasi banjir tidak berjalan dengan baik karena adanya koordinasi tidak memiliki leading sektor koordinator dalam proses penanggulangan bencana.

Temuan Utama oleh penulis untuk menunjukkan hasil keterbaruan hasil penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian terbaru lainnya selain metode, informan dan lokus penulis mendapati bahwa penerepan koordinasi yang baik haruslah di mulai dari rencana kerja dan komunikasi yang berkelanjutan secara terus menerus di mana antara BPBD kota Bengkulu dan Dinas PUPR kota Bengkulu bekerja pada sektor fokus kerja masing-masing, namun bila bencana dan potensi bencana didapati maka segera melakukan koordinasi bersama dan pada tahap tanggap darurat BPBD menjadi leading sektor koordinator.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga menemukan bahwa yang menjadi salah satu penghambat dalam proses koordinasi BPBD Kota Bengkulu dan Dinas PUPR dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu adalah sedikitnya dana anggaran yang di berikan ke PUPR untuk proses mitigasi dan kurangnya jumlah personil sehingga peninjauan lapangan dan penyampaian informasi dari BPBD kepada Dinas PUPR tidak maksimal. Hal ini akan mempengaruhi indikator koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentang koordinasi BPBD dan Dinas PUPR dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu antara lain point berikut :

1. Pada Tahap Rencana Kerja BPBD dan Dinas PUPR sudah memiliki rencana kerja masing-masing Di mana fokus program Kerja BPBD ialah sosialisai, peninjauan pengurangan resiko bencana dan peninjauan rekonstruksi, sedangkan BPBD memiliki rencana kerja untuk untuk mitigasi secara teknis pada mitigasi bencana, Dengan Sasaran Kerjanya ialah Peningkatan kapasitas dalam perlindungan kepada masyarakat.
2. Komunikasi yang dilakukan BPBD dan Dinas PUPR dilakukan dengan cara mengirim utusan atau lewat surat memberikan informasi tentang peninjauan dalam mitigasi bencana dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Koordinator lapangan pada saat peristiwa tanggap darurat dilakukan oleh BPBD yang mengarahkan kegiatan evakuasi dalam bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, swasta dan masyarakat,
4. Terdapat Produk Mitigasi yang Dibangun Dinas PUPR dari informasi peninjauan dari BPBD berupa dua embung, tanggul tebing sungai dan pemasangan pompa air di muara sungai.

Secara Keseluruhan BPBD dan Dinas PUPR memili Tugas masing- masing dalam Penanggulangan Bencana Banjir. Pada Tahap tanggap darurat koordinator koordinasi kegiatan dipagang oleh BPBD sebagai komando kerja, Namun setelah dari itu semuanya kembali ketugas masing-masing instansi. Selanjutnya hambatan dalam proses koordinasi anatar BPBD dan Dinas PUPR ialah sedikitnya dana anggaran yang di berikan ke PUPR untuk proses mitigasi dan Kurangnya jumlah personil sehingga peninjauan lapangan dan penyampaian informasi dari BPBD kepada Dinas PUPR Tidak Maksimal.

Keterbatasan Peneliti: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD dan Kepala Dinas PUPR beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Herman, S.& Suryadi, H. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Banjir Di Kota Pekanbaru Tahun 2011*. repository.unri.ac.id.<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1401/Jurnal%20Online.pdf?sequence=1>. Diakses 21 Januari 2019
- Ramdani, Endah Mustika, 'Koordinasi Oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung', *Jurnal Ilmu Administrasi*, XII.3 (2015), 383–406 <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/50>
- Taslim, Ivan, and Muh. Firyal Akbar, 'Koordinasi Publik Untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir Pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7.2 (2019), 63–78 <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.63-78>
- Widyaningrum, Widdy Yuspita, Rifi Rivani Radiansyah, and Yoyo Sukaryo, 'Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Jurnal JISIPOL', *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5.3 (2021),
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (RINEKA CIPTA, 2010).